

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, dapat terselesaikan sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dalam wujud program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

Pelaporan kinerja adalah salah satu komponen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 adalah untuk memberikan informasi atas pencapaian serta pertanggung jawaban kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, berdaya guna berhasil guna dan bertanggung jawab serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program/kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis.

Demikian Laporan Kinerja disusun untuk menjadi laporan atas kinerja yang mengacu dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami menyadari laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan dalam menyusun laporan ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran demi penyempurnaan laporan dimaksud, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kuala Tungkal, Februari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Tugas dan Fungsi.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022	16
B. Realisasi Anggaran Tahun 2022	36
BAB IV PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil, Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Good Government). Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sistem pertanggung jawaban yang tepat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai suatu instansi pemerintah yang baik berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen rencana kerja tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, sebagai salah satu bagian dari SAKIP, yaitu sebagai media informasi pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjab Barat dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas serta program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan LkjIP Tahun 2022 adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

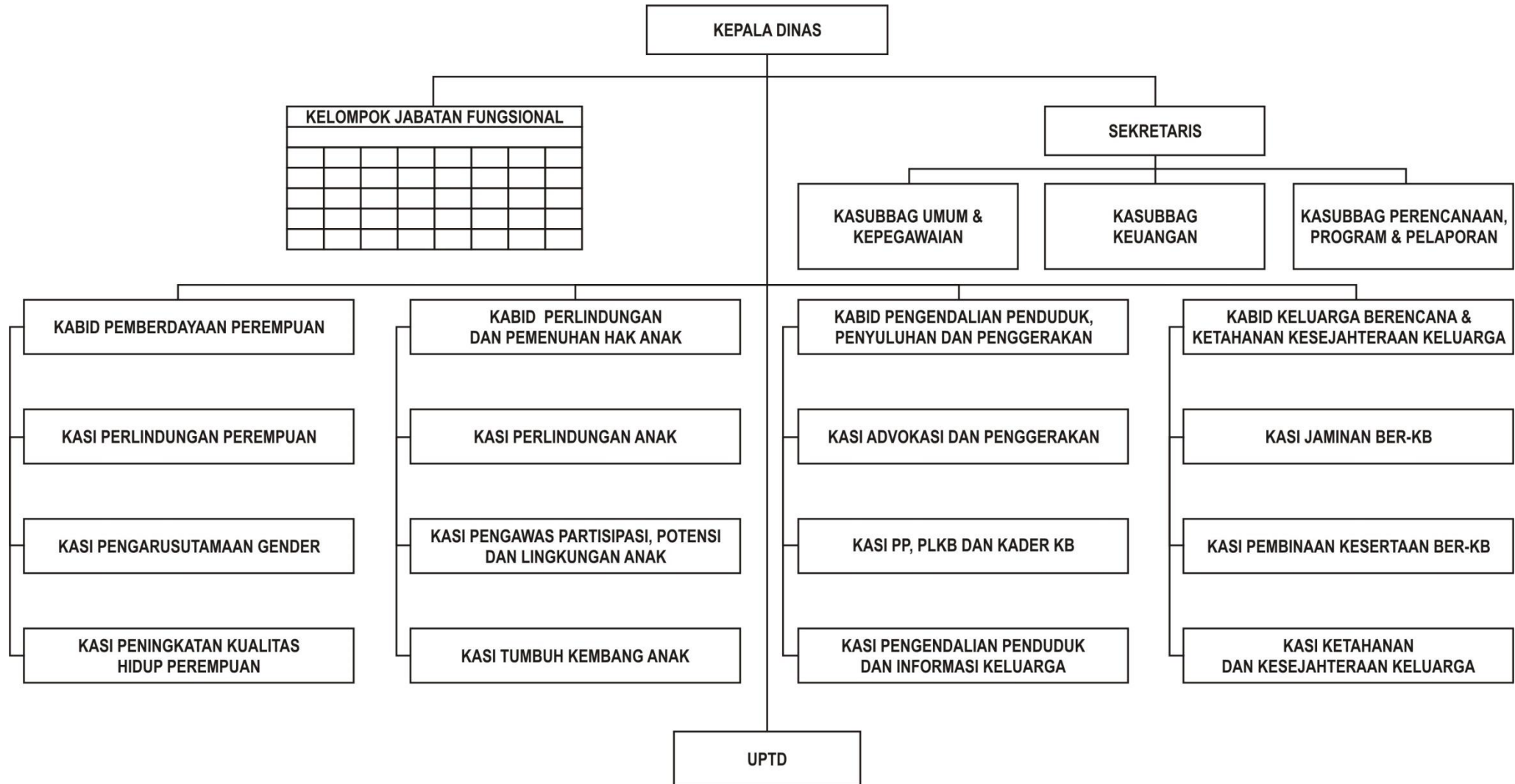
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja
3. Bahan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan serta pemenuhan hak anak, peningkatan pengendalian penduduk dan pelayanan akseptor KB.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung, adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



D. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

1. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, permasalahan dan arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dan isu utama Kementerian/Lembaga terkait tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain:

- a. Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, dan peran perempuan dalam pembangunan
- b. Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di Kab/Kota
- c. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan
- d. Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan
- e. Tingginya laju pertumbuhan penduduk

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal
- b. Terbatasnya SDM yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat, LSM dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih rendah.
- d. Standar Capaian IPG dan IDG belum maksimal
- e. Belum optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- f. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- g. Belum optimalnya pelaksanaan Kabupaten Layak anak
- h. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislative
- i. Tingginya laju pertumbuhan penduduk
- J. Masih rendahnya rasio akseptor KB MKJP
- j. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)
- k. Masih rendahnya rasio Petugas Lapangan KB /PKB di setiap Desa/Kelurahan dibandingkan dengan wilayah kerja.
- l. Tingginya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1
- m. Belum optimalnya peran serta anak/remaja pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dalam meningkatkan capaian program Generasi Berencana (Genre)

2. Landasan Hukum,

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Nomor 104, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 591 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- o. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

3. Sumber Daya Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) bidang. Adapun Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2022, berjumlah 48 orang dengan jumlah PNS 31 orang terdiri laki-laki 12 orang dan perempuan 19 orang dan Non PNS 18 orang terdiri laki-laki 9 orang dan perempuan 9 orang, kemudian ditambah dengan Petugas Lapangan KB (PLKB) PNS berjumlah

14 orang terdiri laki-laki 9 orang dan perempuan 5 orang, serta PLKB/Motivator Non PNS 21 orang terdiri laki-laki 12 orang dan perempuan 9 orang. Pegawai Negeri Sipil tersebut terdiri dari Eselon II.b;1 orang,Eselon III.a; 1 orang, Eselon III.b; 4 orang, Eselon IV.b; 1 orang dan Jabatan Fungsional Umum 12 orang, Jabatan fungsional Perencana 1 orang , Jabatan Fungsional Tertentu12 orang. Di bawah ini dapat dilihat data kepegawaian berdasarkan Eselon/PLKB/TKK dan pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah PNS Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Eselon/JFU dan Pendidikan Tahun 2022

No	Eselon dan JFU	Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan						
			L	P	S-3	S-2	S-1	D-3	SLT A	SLTP	SD
1.	Eselon II.b	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
2.	Eselon III.a	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
3.	Eselon III.b	4	1	3	-	1	3	-	-	-	-
4.	Eselon IV.a	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
6.	Jabatan Fungsional Tertentu	15	5	10	-	4	10	1	-	-	-
7.	Jabatan Fungsional Umum	9	5	4	-	-	1	-	8	-	-
	Jumlah	31	12	19	-	5	16	1	9	-	-
7.	PLKB PNS	14	9	5	-	-	9	-	5	-	-
8.	Motivator KB(Non PNS)	21	12	9	-	-	8	2	11	-	-
9.	TKK	18	6	8	-	-	-	2	12	-	-
	Jumlah	81	44	37	-	2	36	5	38	-	-

4. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut :

Tabel 1.2

Sarana dan Prasarana Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor	1 unit bangunan di Jl. Jend, Sudirman Kuala Tungkal.
2.	Gedung Balai Penyuluhan KB	14 unit di Desa dalam Kcamatan
3.	Kendaraan Dinas roda 4(empat: a. Kendaraan Operasional Kadis b. Kendaraan Operasional Kegiatan c. Kendaraan Mupen KB d. Kendaraan Jemput Antar Peserta KB	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
4.	Kendaraan Dinas roda 2(dua)	18 unit
5..	Peralatan Kantor: a. Komputer b. Laptop c. Printer d. Finger Print e. Air Conditioner(AC) f. Stafol Listrik g. CCTV h. Infocus i. Kipas Angin j. WI-FI k. Scanner	13 unit 9 unit 12 unit 1 unit 10 unit 1 unit 4 set 1 set 2 unit 1 paket 1 Unit

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjab Barat

5. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Tahun 2022, yang disusun dari Bab I sampai dengan Bab IV dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi pembahasan Latar belakang, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Maksud dan Tujuan Penyusunan Lkkip dan Sumber Daya Manusia serta Sistematika Penyajian.

BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Menjelaskan secara ringkas penetapan Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis dan evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. Penutup

Memuat tentang kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra adalah merupakan dokumen turunan dari perencanaan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 telah tertuang tujuan, sasaran, kebijakan dan program sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender
- b. Terwujudnya kualitas hidup dan pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
- c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender, Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
- b. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
- c. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.

2. Kebijakan dan program

Guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membuat rencana dan melaksanakan 9 (sembilan) program utama pada Tahun Anggaran 2022 yang meliputi :

- a. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- e. Program Pemenuhan Hak Anak
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
- g. Program Pengendalian Penduduk
- h. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Adapun kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut adalah:

- a. Program Perlindungan Perempuan Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - 1). Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan lingkup daerah/Kabupaten
 - 2). Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten / Kota
- b. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;

Kegiatan yang dilaksanakan adalah

 - 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota
 - 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota
 - 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- c. Program peningkatan kualitas Keluarga

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

 - 1) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Hak Anak tingkat Kab/Kota
 - 2) Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Kab/Kota
- d. Program Pengelolaan sistem data gender dan Anak
 - 1) Pengumpulan , Pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di Tingkat Kabupaten/Kota
- e. Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

 - 1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota
 - 2) Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup Anak Kewenangan Kab/Kota

- f. Program Perlindungan Khusus Anak
Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - 1) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Kab/Kota
- g. Program Pengendalian Penduduk Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - 1). Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsis dengan pemerintah daerah kab/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
 - 2). Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah Kabupaten / Kota
- h. Program Pembinaan Keluarga Berencana, Kegiatan yang dilaksanakan adalah;
 - 1) Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
 - 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan
 - 3) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kab/Kota
 - 4) Pemberdayaa dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
- i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera, Kegiatan yang dilaksanakan adalah;
 - 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi, misi daerah. Selain itu juga di tingkat perangkat daerah dibuat perjanjian kinerja secara berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/ Kepala Bidang dengan Kepala Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja antara Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dengan Sekretaris/Kepala Bidang.

Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

meliputi 7 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja utama, dengan besaran target sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	68.50
		- Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.81
		- Tingkat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	100%
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.50
		- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69
3	Meningkatnya perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	12
4	Meningkatnya kualitas Keluarga	Angka perceraian	1.25
5	Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	645
6	Terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	Angka Total Kelahiran/ (Total Fertilty Rate/ TFR) per WUS 15-49 tahun	2.50
7	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60.32
		Angka Kelahiran Remaja/ ASFR 15-19 (kelompok umur per 1.000 pada kelompok usia)	68
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	66.8
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	25.05

Indikator kinerja tersebut diatas untuk pencapaiannya dituangkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD dan DAK. Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjab Barat Tahun Anggaran 2022 total anggaran sebesar Rp. 11.940.650.228,- Sumber dana APBD sebesar Rp. 5.809.483.670,- dan DAK sebesar Rp. 6.131.166.558,- Alokasi DAK adalah untuk mendukung pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun rincian

anggaran belanja langsung yang dilaksanakan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

<u>Program:</u>	Anggaran (Rp)
1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	540.881.072,-
2. Program Perlindungan Perempuan	54.055.400,-
3. Program Peningkatan kualitas Keluarga	37.000.000,-
4. Program Pemenuhan hak Anak (PHA)	29.652.500,-
5. Program Perlindungan Khusus Anak	29.999.990,-
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	314.210.036,-
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	28.749.749,-
8. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.701.747.423,-
 APBD	 5.809.483.670,-
DAK	6.131.166.558,-
Program Penunjang KKBPK :	
1. Program Pengendalian Penduduk	130.609.908,-
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana	4.479.056.650,-
3. Program Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera	1.521.500.000,-

J U M L A H **11.940.650.228,-**

Ada 10 (sepuluh) program yang ditetapkan tersebut di atas adalah untuk pencapaian sasaran kinerja Tahun 2022 dan masing-masing program dilaksanakan dengan indikator kinerja sasaran serta kegiatan yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Eselon III dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk setiap program dan menjadi perjanjian kinerja eselon IV, sebagai berikut:

Perjanjian kinerja Eselon III

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Bidang
1	2	3	4	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	68.50	Sekretaris
		- Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.81	
		- Tingkat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	100%	
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.50	Kabid Pemberdayaan Perempuan
		- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69	
3	Meningkatnya perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	12	Kabid Pemberdayaan Perempuan
4	Meningkatnya kualitas Keluarga	Angka perceraian	1.25	Kabid Pemberdayaan Perempuan

5	Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	645	Kabid Perlindungan Hak Anak
6	Terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	Angka Total Kelahiran/ (Total Fertilty Rate/ TFR) per WUS 15-49 tahun	2.50	
7	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR)	Indek Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60.32	Kabid Pengendalian Penduduk, Pen yuluhan dan Penggerakan
		Angka Kelahiran Remaja/ ASFR 15-19 (kelompok umur per 1.000 pada kelompok usia)	68	
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	66.8	Kabid Keluarga Berencana & Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	25.05	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022.

Capaian kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 adalah capaian kinerja diperoleh dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi bidang :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan
2. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara keseluruhan. Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah atau akuntabilitas kinerja ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan secara relative (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, dapat digambarkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2022

No.	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	- Persentase pemenuhan komponen SAKIP	90%	65,48%	72,75%
		- Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	78	-	
		- Persentase penurunan hasil temuan	100%	99,52%	99,52%
2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,50	85,79	98,04
		- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,00	73,20	106
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Ratio kekerasan terhadap Perempuan	12	9,06	75,5%
4.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Angka Perceraian	1,25	1,6	78,13%
5.	Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status Capaian Kabupaten Layak Anak	645	575	89,15%
6.	Terkendalinya Kuantitas dan Kualitas Penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	- Angka Total kelahiran/(Total Fertility Rate/TFR) Per WUS 15-49 tahun	2,50	2,37	94,80%
6.		- Angka Kelahiran Remaja(Perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	68	34,85	54,45%
7.	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	58,20%	53,82%	92,47%
8.		- Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi perempuan Menikah usia 15-49 tahun	66,8%	64%	95,81%
9.		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi/(Unmeet need)	25,05%	16%	63,87%

Capaian target Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan sebagai realisasi Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator kinerja persentase pemenuhan komponen SAKIP dengan target 90% dan realisasi 65,48% dalam kategori B dengan interpretasi Baik, adalah berdasarkan hasil evaluasi Tim evaluasi atas pelaksanaan AKIP OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari laporan hasil evaluasi tersebut bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan SAKIP. Masih ada beberapa komponen yang belum terpenuhi sehingga realisasi pencapaiannya hanya 65,48% dari target yang ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat baru

mencapai 0%, hal ini dapat diketahui dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dinyatakan oleh bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian indikator kinerja persentase penurunan hasil temuan dengan target 100% dan realisasi 99,52%, tingkat capaian ini dapat diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, bahwa ada penurunan jumlah temuan dari Tahun 2019 hasil capaian 89% artinya ada peningkatan penurunan sekitar 6,52%.

2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender, Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 terdiri dari dua indikator yang merupakan tolak ukur keberhasilan sasaran kinerja tersebut yaitu : 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indek Pembangunan Gender (IPG) merupakan alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dengan cara membandingkan indeks pembangunan manusia laki-laki dengan indeks pembangunan perempuan sehingga dapat diartikan juga bahwa IPG menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) dibutuhkan beberapa komponen pengukuran yaitu dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi sebagai berikut : (1) Angka Harapan Hidup, (2) Angka Harapan Lama Sekolah, (3) Rata-rata Lama Sekolah dan (4) Pengeluaran Per-kapita. Jadi Indeks Pembangunan Gender mampu menggambarkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Target IPG berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 adalah 87.50 dan terealisasi 85,79 sehingga persentase capaian IPG adalah 98,04%. Berdasarkan persentase capaian IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 mendekati 100 persen hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat baik.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Untuk mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibutuhkan beberapa komponen pengukuran yaitu: (1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen, (2) Perempuan sebagai manajer, profesional, administrasi dan teknis serta 3) sumbangan perempuan dalam pendapatan. Target IDG berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 adalah 69,00 dan terealisasi 73,20

sehingga persentase capaian IDG adalah 106%, persentase ini sedikit menurun 5% dari pencapaian tahun 2021 yaitu 111,96%.

3. Sasaran kinerja meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak capaian indikatornya penurunan Ratio Kekerasan terhadap Perempuan merupakan alat ukur untuk mengetahui jumlah perempuan yang mengalami kekerasan per 100.000 jumlah penduduk perempuan semakin rendah ratio kekerasan terhadap perempuan maka semakin sedikit perempuan yang mengalami kekerasan berarti tingkat perlindungan terhadap perempuan semakin meningkat. Pada tahun 2022 Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan penurunan ratio kekerasan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pada ratio 12 dan terealisasi 9,06 sehingga persentase capaian penurunan angka ratio kekerasan adalah 75,5%. Diperolehnya peningkatan angka ratio kekerasan 16% berdasarkan jumlah kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2022 berjumlah 23 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan yang mengalami kekerasan berjumlah 23 orang sehingga diperoleh ratio kekerasan terhadap per 100.000 adalah 9,06.
4. Sedangkan indikator Status Capaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2022 target Skor 645 dan realisasi Skor 575 maka tingkat capaian 89,14%. Hal ini terjadi karena beberapa factor antara lain:
 - Para Pemangku Kepentingan dan Stakeholder dalam Gugus Tugas KLA dalam Hal Perlindungan Anak belum di tuangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Pembangunan dalam bentuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta bermitra, bersenergi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha.
 - Implementasi kebijakan daerah dalam perlindungan Anak di kabupaten Tanjung Jabung Barat belum semua terpenuhi di antaranya :
 - Sumber Daya Manusia yang menangani Kabupaten Layak Anak belum semua mengikuti Pelatihan KHA
 - Belum semua Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Layak Anak.
 - Belum Semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah atas menjadi Sekolah Ramah Anak (sekitar 50%) dan
 - Masih kurangnya ketersediaan Ruang Bermain Anak yang memenuhi standar
 - Untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2026, Para Pemangku Kepentingan dan Stakeholder dalam Gugus Tugas KLA dalam Hal Perlindungan Anak belum di tuangkan

dalam bentuk Program dan Kegiatan Pembangunan dalam bentuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta bermitra, bersenergi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha.

- Implementasi kebijakan daerah dalam perlindungan Anak di kabupaten Tanjung Jabung Barat belum semua terpenuhi di antaranya :
 - a. Sumber Daya Manusia yang menangani Kabupaten Layak Anak belum semua mengikuti Pelatihan KHA
 - b. Belum semua Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Layak Anak.
 - c. Belum Semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah atas menjadi Sekolah Ramah Anak (sekitar 50%) dan
 - d. Masih kurangnya ketersediaan Ruang Bermain Anak yang memenuhi standar

maka upaya yang dilakukan yaitu Tahun 2022 ini Tim Pengumpul Data yang ada pada Perangkat Daerah harus mengoptimalkan dalam peningkatan indikator Kabupaten Layak Anak, kemudian memaksimalkan pemenuhan indikator Kecamatan Layak Anak dengan sebutan KELANA dan Desa/Kelurahan Layak Anak dengan sebutan DEKELA dengan mengimplementasikan DEKELA dalam anggaran Desa/Kelurahan serta melibatkan Forum Anak Daerah (FAD), Perlindungan Anak berbasis Masyarakat (PATBM) baik pada pengumpulan Data DEKELA dan pelaksanaan anggaran tersebut.

5. Sasaran kinerja terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi pada indikator TFR dan ASFR telah mampu memenuhi target yang telah ditentukan yaitu persentase capaian pada Indikator TFR (Total Fertility Rate) adalah 105,4%, dan ASFR (Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun) adalah 194% capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan hasil penghitungan BPS, Tahun 2022 tahun mencapai angka sebesar 1,3% dari yang ditargetkan sebesar 2,29% atau terjadinya penurunan sebesar 0,26%. Pada Tahun 2022 mencapai 5,813 jiwa, atau menurun sebesar 556 jiwa dari tahun 2019 yang mencapai angka sebesar 6.369 jiwa. Turunnya laju pertumbuhan penduduk ini berkorelasi positif terhadap angka kelahiran (fertilitas), angka kematian (mortalitas), migrasi masuk dan migrasi keluar serta signifikan terhadap pemakaian angka kontrasepsi (CPR) sebesar 84,20%, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 9,66%, dan jumlah akseptor ber-KB 51.510 PUS. Namun capaian tersebut di atas masih mengalami kendala diantaranya belum optimalnya penggunaan MKJP, pemakaian kontrasepsi

A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2022 dengan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

No.	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	-	Persentase pemenuhan komponen SAKIP	90%	65,48	60,37
		-	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	78	83,81	83,81
		-	Persentase penurunan hasil temuan	100%	99,52%	99,52%
2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	Indek Pembangunan Gender (IPG)	87,50	85,79	85,68
		-	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,00	73,20	68,31
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		Ratio kekerasan terhadap Perempuan	12	9,06	40
4.	Meningkatnya Kualitas Keluarga		Angka Perceraian	1,25	1,6	-
5.	Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak (KLA)		Status Capaian Kabupaten Layak Anak	645	575	500
6.	Terkendalnya Kuantitas dan Kualitas Penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	-	Angka Total kelahiran/(Total Fertility Rate/TFR) Per WUS 15-49 tahun	2,50	2,37	2,58
6.		-	Angka Kelahiran Remaja(Perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	68	34,85	85,00
7.	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	-	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	58,20%	53,82%	-
8.		-	Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi perempuan Menikah usia 15-49 tahun	66,8%	64%	85%
9.			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi/(Unmeet need)	25,05%	16%	9,19%

Perbandingan capaian kinerja pada indikator kinerja antara realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun sebelumnya (Tahun 2021) dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa IPG Tahun 2022 target sebesar 87,50 dan realisasi sebesar 85,68 maka tingkat capaian 99,88%. artinya realisasi Tahun 2022 adalah sedikit lebih tinggi dari Tahun 2021 yaitu 99,05

Tolok ukur keberhasilan sasaran kinerja meningkatnya perlindungan terhadap perempuan adalah penurunan ratio kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan tabel 3.2 diatas terlihat bahwa realisasi capaian penurunan ratio kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2022 mengalami

penurunan dari tahun 2019 sebesar 60% sedangkan penurunan ratio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 hanya mengalami penurunan sebesar 40%.

Penurunan Ratio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 menggambarkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan pada tahun 2022 eningkat. Pada tahun 2022 jumlah kasus kekerasan sebanyak 25 kasus dengan jumlah perempuan sebagai korban sebanyak 20 dengan ratio kekerasan 18, dibandingkan dengan tahun 2019 berjumlah 28 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 20 dan ratio kekerasan adalah 12, artinya terjadi peningkatan ratio kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah perempuan yang mengalami kekerasan meningkat. 9 di Tahun 2019 artinya tidak mencapai target 70%.

Perkembangan Ratio Kekerasan terhadap perempuan dari Tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 3.3

Tabel 3.3 Perkembangan Ratio kekerasan terhadap perempuan Tahun 2018-2022

Tahun	Ratio Kekerasan
2018	25(16%)
2019	28(17,38%)
2020	30(19,54%)
2021	29(18,68)
2022	23(14%)

Sumber Data: Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB

Adapun perkembangan kasus kekerasan dari Tahun 2018 s/d 2022 dan jumlah kekerasan berdasarkan jumlah pelaku dan korban Tahun 2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Perkembangan Kasus Kekerasan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 s.d 2022

NO.	JENIS KASUS	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	9	4	6	14	8
2.	Kekerasan Seksual	15	13	15	16	11
3.	Kekersan Fisik	7	14	8	7	10
4.	Kekerasan Psikis	2	0	2	7	3
5.	TPPO	0	0	0	0	2
6.	Lainnya	2	1	0	0	0
	Jumlah	37	32	31	44	34

Sumber Data: Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB

Tabel 3.5
Jumlah Kekerasan berdasarkan jumlah Pelaku dan Korban Tahun 2022

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah	Pelaku		Korban	
			Lk	Pr.	Lk	Pr.
1.	Fisik	10	7	2	3	7
2.	Psikis	3	1	1	1	2
3.	Seksual	11	12	0	0	11
4.	Penelantaran	2	2	0	1	1
5.	TPPO	2	1	0	1	1
6.	Lainnya	1	0	1	0	1
	Jumlah	29	23	4	6	23

Kasus kekerasan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2022 naik turun, pada tahun 2022 terjadi penurunan dari 44 kasus pada tahun 2021 turun menjadi 34 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pemberian edukasi secara terus menerus mulai mendapatkan hasil walaupun belum maksimal tetapi secara kasus ada penurunan yang terjadi, dan hal ini akan terus dilakukan sebagai upaya penekanan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada kasus kekerasan terhadap anak Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 5.1
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada Tahun 2016 - 2022
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



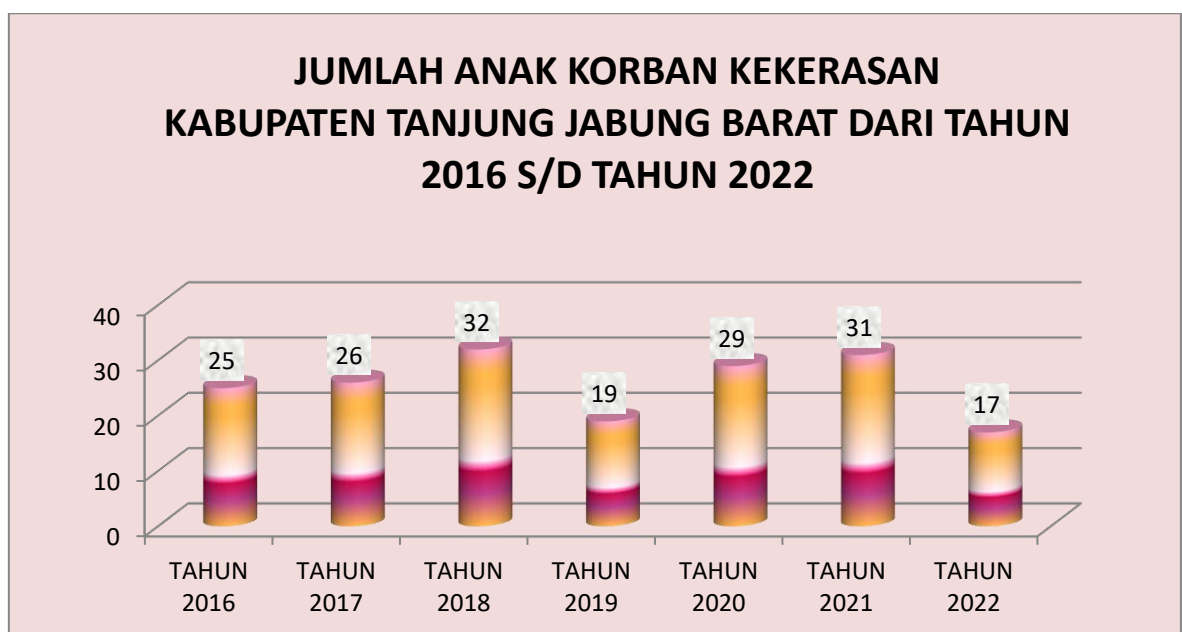
Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 35 %, penurunan ini merupakan buah dari berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan bersama-sama lintas sektor tetapi meskipun data menunjukkan adanya penurunan kasus kekerasan terhadap anak, namun angka tersebut masih memprihatinkan. “Kita tidak boleh berpuas hati dan berhenti di sini. Perjalanan kita masih panjang. Seharusnya, tidak boleh ada satu pun anak yang mengalami kekerasan, apapun alasannya. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak untuk memperkuat kembali sinergi dalam memerangi kekerasan terhadap anak. Sekecil apapun upaya yang kita lakukan, jika dilakukan secara bersama-sama, pasti hasilnya akan luar biasa.

Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak banyak disebabkan oleh penggunaan media sosial, dimana anak-anak memanfaatkan waktu luang dengan bermain hp tanpa kontrol dari orang tua. Untuk mengurangi pengaruh media sosial perlu strategis dalam

menguatkan fungsi dan peran keluarga dalam proses pendampingan anak selama berkegiatan di rumah. Kapasitas keluarga perlu diperkuat terutama fungsi keluarga dalam mendampingi anak . "Meskipun tidak mudah, dengan upaya maksimal dan kerja sama sedini mungkin dan memperkokoh peran serta sekolah, keluarga, dan masyarakat, seharusnya kita mampu bersama-sama mengatasi kasus kekerasan terhadap anak selain itu perlu kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (kominfo) dan kepolisian untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak lewat dunia maya.

Jumlah korban kekerasan terhadap anak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan namun pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi dan tahun 2020 serta tahun 2021 mengalami peningkatan lagi tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 5.2
Jumlah Anak korban kekerasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 s/d Tahun 2022.



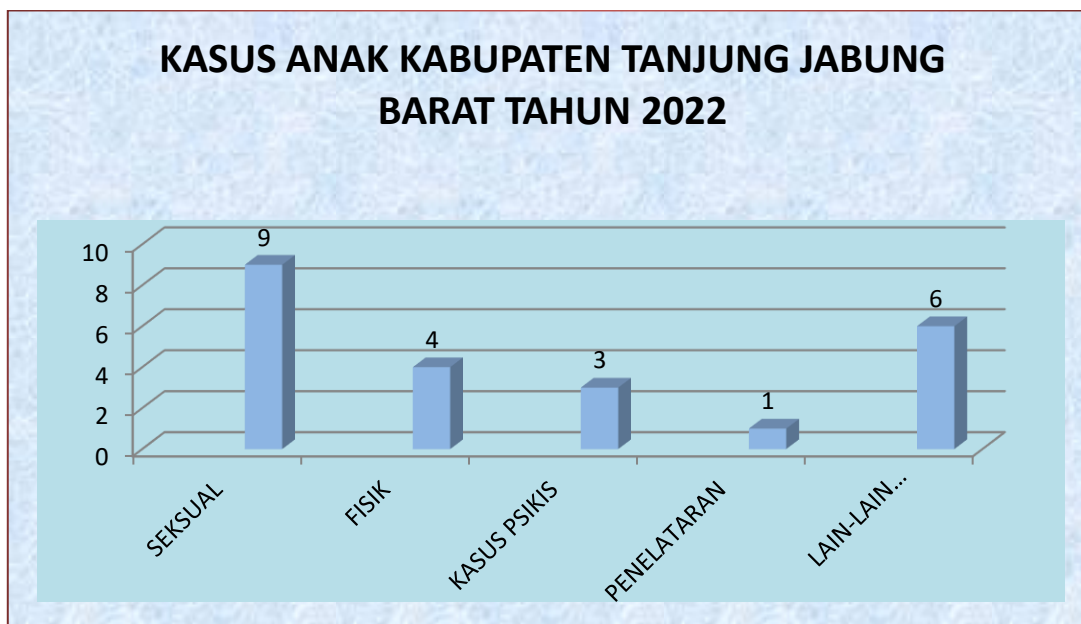
Korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 45% dari tahun 2021, dimana setiap tahunnya kasus kekerasan seksual selalu tertinggi. Pada tahun 2022 korban kekerasan seksual terhadap anak mencapai 53 % dari total anak yang mengalami kekerasan . Korban kekerasan terhadap anak setiap tahunannya diatas 58,8 % adalah perempuan, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Korban kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 s/d 2022

No	Tahun	Korban		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	2016	5	20	25
2.	2017	8	18	26
3.	2018	6	28	34
4.	2019	6	14	20
5.	2020	3	26	29
6.	2021	9	22	31
7.	2022	7	10	17

Pada tahun 2022 kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dan jenis kekerasan yang terjadipun bervariasi, untuk jelasnya dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 5.3
Jenis kasus anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2022



Jenis kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), persetujuan dan pelecehan seksual.

Tabel 5.2
Jenis kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin
Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2022

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus	Jumlah Korban kekerasan berdasarkan jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Penelantaran Anak	1	1	0	1
2.	Seksual	9	0	9	9
3.	Fisik	4	4	0	4
4.	Psikis	3	2	1	3
	Total	17	7	10	17

Selain jenis kekerasan diatas kasus anak yang lain yaitu kasus anak berhadapan dengan hukum berjumlah 6 kasus karena lakalantas, pencurian dan pelaku persetubuhan/pelecehan seksual. Untuk kasus yang berhadapan dengan hukum melalui P2TP2A berkerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres telah memberikan pendampingan pengacara, psikologis dan usaha diversifikasi (3 kasus berhasil diversifikasi).

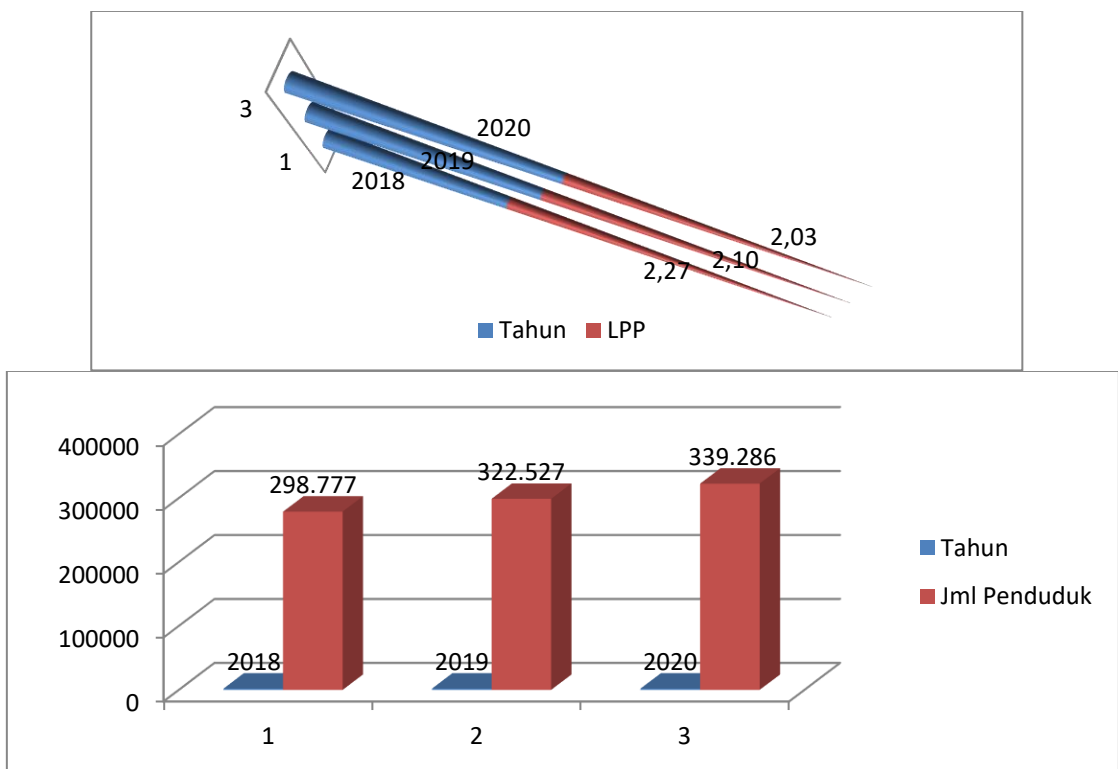
Rasio kekerasan terhadap anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 adalah 2,97 (Target 3) dengan tingkat capaian 99,2 % (jumlah anak korban kekerasan/jumlah seluruh anak X 10.000) (31 anak / 104.216 * 10.000) dan tahun 2022 yaitu 0,52 (target 2) dengan tingkat capaian 26 % (17 anak/324.456*10.000). Namun data ini belum bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena perhitungannya dibuat berdasarkan data kasus yang melaporkan ke UPPA Polres dan P2TP2A Kab.Tanjung Jabung Barat . Masih rendahnya laporan kasus kekerasan terhadap anak disebabkan budaya kearifan lokal seperti korban malu membuat pengaduan ke pihak yang berwenang (P2TP2A/UPPA Polres) karena dianggap aib keluarga, belum semua masyarakat tersosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan belum semua Desa/Kelurahan memiliki Forum Anak Daerah (PATBM) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sementara desa/kelurahan yang sudah memiliki FAD dan PATBM belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Untuk indikator Status Capaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2022 target Skor 500 dan realisasi Skor 500 maka tingkat capaian 100%. Tercapainya target Skor 500 dikarenakan adanya peningkatan pemahaman, koordinasi pada Organisasi Perangkat Daerah dan Tim Pengumpul Data tentang Indikator Kabupaten Layak Anak serta diadakannya pertemuan pengumpulan data secara rutin. Lebih dari 50% tingkat Kecamatan sudah melakukan Deklarasi Kecamatan layak Anak (KELANA) serta semua Kecamatan sudah menginstruksikan ke setiap Desa-nya agar mengumpulkan data Desa/Kelurahan layak Anak (DEKELA). Untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Kabupaten Layak Anak dengan Skor 599(Pratama) sampai dengan Tahun 2022 maka upaya yang dilakukan yaitu Tim Pengumpul Data yang ada pada Perangkat Daerah harus mengoptimalkan dalam mengumpulkan data indikator Kabupaten Layak Anak, kemudian memaksimalkan pemenuhan indikator Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) dengan mengimplementasikan data DEKELA dalam anggaran Desa/Kelurahan serta melibatkan Forum Anak Daerah(FAD), Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat(PATBM) baik pada pengumpulan data DEKELA dan pelaksanaan anggaran tersebut.

Dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana salah satu upaya mengendalikan indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk, dengan meningkatkan akselerasi terwujudnya penduduk tumbuh seimbang, norma keluarga kecil bahagia sejahtera dan indeks pembangunan keluarga berwawasan kependudukan, mengintegrasikan strategi pengendalian penduduk dengan memadukan dan sinkronisasi kebijakan, meningkatkan kerjasama pendidikan kependudukan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu dan dampak kependudukan yang trendnya cenderung semakin meningkat perkembangannya dari tahun ke tahun.

Adapun perkembangan penduduk dan laju pertumbuhannya dapat dilihat gambar di bawah ini.

Grafik 1
Perkembangan Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017 – 2022



Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa perkembangan sector kependudukan setiap tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih dapat dikendalikan.

Pada tahun 2022 capaian indikator laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,03%, sedangkan tahun 2019 sebesar 2,10 % dari target sebesar 2,19 %. Artinya Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 dapat ditekan sebesar 0,16 % dibanding tahun 2019 yang hanya 0,19%. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi dari jumlah kelahiran (*birth*), dan kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Pada tahun 2022 terjadi kelahiran sebesar 5.813 jiwa dan pada tahun 2019

sebesar 6.353 jiwa, terjadi penurunan kelahiran sebesar 540 jiwa. Mobilitas penduduk juga cukup tinggi, rata-rata per 1000 orang penduduk jumlah migrasi masuk sebesar 12,22 dan jumlah migrasi keluar sebesar 12,17. Sedangkan capaian indikator Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2022 sebesar 2,85 dan tahun 2019 sebesar yaitu 2,69 dari target 2,59. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak yang dimiliki seorang wanita usia 15-49 tahun sampai akhir masa reproduksinya masih berkisar di angka 3-4 anak, belum mencapai target yang diinginkan yaitu bahwa rata-rata jumlah anak yang dimiliki seorang wanita usia 15-49 tahun sampai akhir masa reproduksinya adalah 2-3 anak atau 2,59, optimalnya mendekati TFR Provinsi Jambi yaitu 2,3 (SDKI). Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang (PTS) sebaiknya TFR berada di angka 2,0 artinya rata-rata per wanita (15-49) punya 2 anak.

Masih relative rendahnya capaian kinerja indikator Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat dilihat perkembangannya pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Program Kependudukan,
Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga
2020 – 2022

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,10	2,03	1,3
2.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	2,69	2,59	2,37
3.	Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraception Prevelence Rate/CPR)	84,25	85,00	64%
4.	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	9,19	9,19	16%
5.	Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	69	69	34,85
6.	Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan dari WUS (15-49 Tahun)	15,79	15,79	2,37

Sumber: Bidang Dalduk dan KB DP3AP2KB Kab. Tanjab Barat

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Capaian Indikator Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat rata-rata pertumbuhannya tiga tahun terakhir cukup baik.

Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) tahun 2022 juga mengalami sedikit penurunan, dari 51.510 Pasangan Usia Subur (PUS) yang memakai alat kontrasepsi sebesar 84,20% terjadi penurunan sebesar 0,05%. Penurunannya ini salah satunya disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang mau tidak mau harus menerapkan social

distancing serta mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dengan demikian harus ada upaya ekstra untuk meningkatkan penyuluhan dan pelayanan prima dalam rangka menekan jumlah akseptor Drop Out sehingga efektif menaikkan peserta KB aktif. Capaian target Unmet need di tahun 2022 sebesar 9,66%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 9,19%, jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,47%. Tidak cukup dengan pelayanan KB yang berkualitas dan dukungan sarana prasarana yang memadai, tetapi juga harus dibarengi dengan kegiatan advokasi KIE yang intensif oleh penyuluh KB atau Kader.

Dari uraian di atas, dapat disampaikan beberapa permasalahan dan yang menyebabkan capaian target indikator Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga belum tercapai peningkatan dan penurunannya secara signifikan sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yaitu masih di angka 2,10 dan Angka Kelahiran Total (TFR) masih di angka 2,69, disebabkan masih kurangnya kerjasama, pemahaman dan kesadaran institusi/lembaga dan masyarakat tentang Isu dan dampak kependuduk serta kemanfaatan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
2. Masih rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) hanya 21,54% selebihnya 78,46% menggunakan Non MKJP, hal ini dikarenakan pemahaman dan kemampuan masyarakat terhadap efektivitas penggunaan MKJP yang relative masih rendah serta keterbatasan kemampuan pemenuhan pelayanan MKJP kepada masyarakat, terutama masyarakat Pra Sejahtera dan sejahtera I.
3. Masih relative tingginya Kebutuhan ber-KB Tidak Terpenuhi (*unmet need*) dan tingkat Ketidak berlangsungan Pemakaian Kontrasepsi, disebabkan masih kurangnya fasilitasi dan dukungan sumber daya di semua tingkatan serta masih belum optimalnya pemberdayaan institusi/lembaga/kelompok-kelompok kegiatan masyarakat.

Guna mengatasi permasalahan dan penyebab capaian target indikator Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang belum tercapai peningkatan dan penurunannya, terutama Laju Pertumbuhan Penduduk dan TFR yang masih di atas angka 2 menjadi di bawah angka 2, dan Penggunaan Kontrasepsi MKJP dapat ditingkatkan, serta Angka Unmet Need dan Putus Pakai dapat diturunkan secara signifikan, sangat perlu dilakukan upaya-upaya dan solusi sebagai berikut:

1. Peningkatan kerjasama, sinergitas dan intensitas fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, advokasi pergerakan dan KIE kepada masyarakat, terutama masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera I tentang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, baik secara formal, informal dan non

formal di semua tingkatan.

2. Peningkatan penyuluhan dan konseling kemanfaatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta pembinaan dan pengayoman terhadap masyarakat, Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta KB/akseptor KB dan Wanita Usia Subur 15-49 tahun.
3. Peningkatan Pemberdayaan Institusi masyarakat dan kelompok-kelompok kegiatan serta pemenuhan kebutuhan tenaga Lini Lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PKB/PLKB PNS/Non PNS/PPKBD/Sub PPKBD) secara ideal dan proporsional, guna penguatan kapasitas dan kemampuan pelayanan lini lapangan dalam mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

A.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Renstra.

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja s/d Renstra dengan Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi Ta.2022	Tkt. Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indek Pembangunan Gender (IPG)	90	85,79	95.32
		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	71	73.20	103
2.	Meningkatnya perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan	1	14	7.14
3.	Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak	Predikat capaian Kabupaten Layak Anak	845	575	68.04
4.	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	66.68	53.82	80.71
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.3	2.37	97.04

	Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate (CPR))	70.1	64%	91.29
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15.05	16	106
	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	64	34.85	54.45

A. 4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi

Tingkat keberhasilan yang menjadi pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2022, dapat disampaikan yaitu jika dilihat dari alokasi anggaran yang ditetapkan pada masing-masing 10 (sepuluh) program yang ditetapkan Tahun Anggaran 2022, bahwasanya pelaksanaan program yang bersumber dari APBD Tahun 2022, realisasi keuangan capaiannya secara keseluruhan mencapai 86.51% dan fisik 94.19%. Karena pencapaian pelaksanaan program ini adalah merupakan keberhasilan yang menjadi kinerja dari pada Perangkat Daerah, maka penyebab keberhasilan dimaksud adalah sebagai berikut:

Permasalahan dalam mencapai Indeks Pembangunan Gender (IPG):

- a. Regulasi Daerah dan komitmen untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih kurang
- b. Koordinasi lintas sektor melalui kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) belum optimal.
- c. Masih rendahnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
- d. Masih kurangnya SDM terlatih untuk PPRG dan penyediaan/pemanfaatan data pilah dalam pengambilan keputusan masih belum optimal.

Solusi dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender:

- a. Menyusun regulasi daerah dan komitmen stakeholder untuk mendorong peningkatan IPG, mengoptimalkan kinerja kelompok kerja PUG, Focal Point untuk meningkatkan daya ungkit komponen IPG.
- b. Percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender(PUG) melalui PPRG dan ARG dan penyusunan/pemanfaatan data pilah oleh OPD.

Permasalahan mencapai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- a. Jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum mencapai 30%

- b. jumlah perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknis masih kurang, serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja masih kurang.

Solusi dalam upaya peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG):

- a. Menyusun regulasi daerah dan komitmen stakeholder untuk mendorong peningkatan IDG, meningkatkan kompetensi perempuan agar mampu berperan di sektor ekonomi dan politik.
- b. Penguatan kemitraan dan jejaring untuk meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi perempuan.

Permasalahan pencapaian penurunan ratio kekerasan terhadap perempuan dan anak:

- a. Masih rendahnya komitmen stakeholder untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
- b. Belum optimalnya kinerja unit layanan penanganan pengaduan terhadap perempuan dan anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak.
- d. Masih kurangnya SDM terlatih dalam pelayanan dan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak.

Solusi dalam upaya menurunkan ratio kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak:

- a. Menyusun regulasi daerah dan komitmen stakeholder untuk mendorong peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak.
- b. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Melakukan penguatan kelembagaan unit layanan di tingkat Kecamatan dan Desa serta menjalin kemitraan dengan perusahaan
- d. Penguatan kemitraan dan jejaring kerja dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat.

Dalam hal perkembangan sektor Keluarga Berencana ini ada beberapa masalah yang menyebabkan adanya penurunan peserta KB Aktif dan Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu:

- Peserta KB Aktif ada yang ingin segera memiliki anak atau ingin hamil dan Peserta KB ada yang tidak cocok dengan salah satu alat, obat Kontrasepsi, karena memiliki penyakit hipertensi dan lainnya.
- Masih terbatasnya tenaga lini lapangan (PKB/ PLKB/ Motivator).
- Masih relative rendahnya pemahaman kader/ masyarakat/ keluarga/ Pasangan Usia Subur (PUS)/ Wanita Usia Subur (WUS) tentang tujuan dan manfaat program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK).

***Solusi :**

1. Menambah Penyuluh/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) atau motivator Keluarga Berencana sehingga kedepannya petugas keluarga berencana semakin kuat sekaligus mampu mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi, advokasi dan penggerakan terutama tentang pentingnya program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik tentunya harus didukung dengan Sumber Daya Aparatur dan anggaran yang tersedia, untuk melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan dari pada aparatur) serta belanja Langsung (pelaksanaan pembangunan/program dan kegiatan). Adapun belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan alokasi anggaran setiap tahunnya. Adapun anggaran program dan kegiatan yang dinyatakan pada perjanjian kinerja Tahun 2022 antara Bupati Tanjung Jabung Barat dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan anggaran APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

a. Alokasi Anggaran per sasaran strategis dan indikator kinerja :

Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan APBD Perubahan 2022 diperbandingkan dengan total jumlah anggaran belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digambarkan pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Per - Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Proporsi (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan komponen SAKIP Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase penurunan hasil temuan	5.108.107.210	40.24%
2.	Meningkatnya implementasi PengarusUtamaan Gender, peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indek Pembangunan Gender (IPG) Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	609.173.913	4,79%
3.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Persentase penurunan Ratio kasus kekerasan terhadap perempuan Persentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif	54.055.400	0,42%
4.	Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak dan kualitas perlindungan anak	Status capaian Kabupaten Layak Anak Rasio kekerasan terhadap terhadap anak	146.164.480	1,15%
5.	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate (CPR)) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 tahun)	6.776.149.205	53,38%
	Jumlah		12.693.650.208	100,00

a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan program/Kegiatan

Dalam hal mencapai kinerja yang telah ditetapkan sesuai sebagaimana yang telah disajikan di atas, maka Tahun 2022 program strategis dan kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kab/Kota
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak:
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pemenuhan Hak Anak
 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Pengendalian Penduduk
 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

B. Realisasi Anggaran Tahun 2022.

Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah, didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dukungan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 8.312.909.626,- realisasi sebesar Rp. 5.613.913.195,- atau 87,99% yang terdiri dari APBD sebesar Rp. 1.531.955.974,- realisasi sebesar Rp. 1.435.338.127,- atau 93,69% dan DAK sebesar Rp. 4.848.106.000,- realisasi sebesar Rp. 4.177.975.068,- atau 86,18%. Kemudian anggaran yang ditetapkan tersebut adalah merupakan Belanja Langsung Pembangunan sedangkan Belanja Tidak langsung adalah merupakan Belanja Pegawai (Gaji ASN) yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.380.740.582,- realisasi sebesar Rp. 3.869.886.655 atau 88,34%.

Adapun anggaran pembiayaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Rincian Belanja Langsung dan Realisasi Tahun 2022

(dalam rupiah)

No.	Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi 2022	%
1	BELANJA	12.693.650.208,00	10.981.213.194,00	86,51
1.1	BELANJA OPERASI	10.792.306.747,00	9.093.744.546,00	84,26
1.	BELANJA PEGAWAI	4.380.740.582,00	3.869.886.655,00	88,34
2.	BELANJA BARAN DAN JASA	6.411.566.165,00	5.223.857.891,00	81,48
2	BELANJA MODAL	1.901.343.461,00	1.887.468.648,00	99,27
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.401.343.461,00	1.394.228.400,00	99,49
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	493.240.248,03	98,56
	JUMLAH	12.693.650.208,00	10.981.213.194,03	86,51

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah merupakan dokumen laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati, kemudian menyampaikannya kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi, kebijakan serta wewenang yang dimiliki.

Wujud pertanggung jawaban dimaksud berupa hasil capaian indikator sasaran, program dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dilaksanakan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dilakukan dengan program yang dijabarkan dalam kegiatan, kemudian diukur tingkat pencapaian kinerja melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka keseluruhan proses tersebut dituangkan dalam suatu bentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dilaksanakan setiap tahun.

Demikian laporan kinerja ini dibuat berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan sangat disadari dalam penyusunannya belum sempurna, sehubungan dengan itu diharapkan adanya masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan laporan ini, dalam upaya perbaikan untuk masa yang akan datang, dan laporan kinerja ini semoga bermanfaat, juga dapat lebih meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan program pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Februari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. MUHAMMAD YUNUS

Pembina Utama Muda

NIP. 19680417 198810 1 001